



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PLANNING OF DEVELOPMENT IN HUNTU BARAT VILLAGE, BULANGO SELATAN DISTRICT, BONE BOLANGO REGENCY

Moh Fadli Bado'o^{1*}, Ismet Sulila², Indah Yuliani Solihin³

¹Universitas Negeri Gorontalo, Email: fadlibadoo@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: ismet.sulila@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: dwiindah@ung.ac.id

*email koresponden: fadlibadoo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2658>

Abstrack

This study aims to analyze community participation in village development planning in Huntu Barat Village, Bulango Selatan District, Bone Bolango Regency. The focus of this research uses the theory of community participation according to Cohen and Uphoff, which includes four stages of participation: participation in decision-making, participation in implementation, participation in the utilization of results, and participation in evaluation. The background of this research is based on the importance of community involvement in every stage of village development as a form of participatory development. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out thru observation, interviews, and documentation. The research results show that community participation in village development planning in Huntu Barat Village is generally not yet fully optimal. This condition is particularly evident in the decision-making aspect, where some community members are still less active in attending village meetings or expressing their opinions directly, resulting in uneven community involvement in determining development priorities. Meanwhile, in the aspects of implementation, utilization of results, and evaluation of development, community participation has been quite good. The community participates in development activities according to their respective abilities, utilizes the results of the development carried out to support daily activities, and is given the opportunity to provide feedback and input on the village development program. The conclusion of this research indicates that community participation in the village development planning in Huntu Barat Village still needs to be improved, especially in the decision-making aspect, so that community involvement can be more active, equitable, and optimal in every stage of village development.

Keywords: *community participation, village development planning, village development, public administration.*



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Fokus penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang meliputi empat tahapan partisipasi, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa sebagai wujud pembangunan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat secara umum belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini terutama terlihat pada aspek pengambilan keputusan, dimana masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif menghadiri musyawarah desa maupun menyampaikan pendapat secara langsung, sehingga keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik. Masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing, memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap program pembangunan desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pengambilan keputusan, agar keterlibatan masyarakat dapat lebih aktif, merata, dan optimal dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa, administrasi publik.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional, sehingga pembangunan di tingkat desa berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, belum optimalnya pelaksanaan pembangunan desa dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena berpengaruh terhadap relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan program yang dirancang dan dilaksanakan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada partisipasi (Bratakusumah, 2003). Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif menjadi strategi penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Tanpa partisipasi yang memadai, proses perencanaan cenderung bersifat formalitas dan berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa.



Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Ketentuan ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa, terutama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum resmi penyaluran aspirasi masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat berperan dalam menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes. Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas dan arah pembangunan desa.

Sementara itu, pelaksanaan Musrenbang di provinsi Gorontalo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2007 komitmen terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai unsur penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk hingga ke tingkat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan perspektif partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi, serta memperkuat ruang partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Huntu Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam merumuskan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1980) sebagai landasan analisis. Teori tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat sub fokus, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam



pelaksanaan (participation in implementation), partisipasi dalam pemanfaatan hasil (participation in benefits), dan partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Huntu Barat, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan, masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan desa, mulai dari proses musyawarah desa, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga pemberian tanggapan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi masyarakat masih menunjukkan perbedaan, karena tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat keaktifan dan keterlibatan yang sama dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Selain itu, keberhasilan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam mendukung jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu, komunikasi, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi hal yang penting agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan membahas fokus dan subfokus penelitian berdasarkan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi pembangunan desa.

1. pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, proses pembangunan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up.



Pendekatan top-down dilakukan melalui penjabaran kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, hingga RPJMD sebagai pedoman pembangunan di daerah. Sementara itu, pendekatan bottom-up dilakukan melalui penghimpunan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah yang disampaikan melalui forum musyawarah pembangunan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya selaras dengan arah kebijakan pemerintah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tingkat desa, pendekatan bottom-up diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui Musrenbangdes, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, maupun usulan pembangunan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Selain itu, berbagai usulan yang masuk akan disesuaikan dengan kondisi desa, kemampuan anggaran, serta skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan usulan, pendapat, serta ikut menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penentuan keputusan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Huntu Barat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah dilakukan melalui Musrenbangdes yang dilaksanakan setiap tahun. Forum tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, Karang Taruna, kelompok masyarakat, serta masyarakat umum untuk membahas rencana pembangunan desa. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun kebutuhan pembangunan sesuai kondisi lingkungan mereka. Berbagai usulan yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan saluran air, jalan usaha tani, serta kebutuhan lainnya yang dianggap penting bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan maupun tanggapan terhadap usulan yang dibahas sebelum keputusan pembangunan ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah desa bersama BPD melakukan penyaringan terhadap usulan masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan, tetapi harus melalui proses pertimbangan bersama agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari keterlibatan



masyarakat dalam memberikan ide, usulan, maupun pendapat terhadap program pembangunan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Safutri Sari (2016) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah desa dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbangdes.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Huntu Barat masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak selalu hadir dalam Musrenbangdes karena kesibukan pekerjaan, terutama masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang kurang aktif atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat sehingga lebih memilih menitipkan usulan melalui kepala dusun ataupun perwakilan kelompok masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Slamet (1993) dalam Hakim (2017) yang menyatakan bahwa mata pencaharian dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Gunanta Ginting, Aosi Kuswandi, dan Ayuning Budiati (2024) yang menunjukkan bahwa kendala partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan musyawarah yang berbarengan dengan aktivitas masyarakat serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Demikian demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa di Desa Huntu Barat telah berjalan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya optimal karena tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam forum musyawarah masih berbedabeda, sehingga keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan belum sepenuhnya merata.

2. pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat setelah proses perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan. Dalam sistem pembangunan di Indonesia, pelaksanaan pembangunan desa merupakan tahap lanjutan dari hasil perencanaan yang telah disepakati melalui mekanisme Musrenbangdes dan dituangkan ke dalam dokumen RKPDes. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong royong, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga diharapkan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi pada tahap pelaksanaan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan melalui sumbangan tenaga, waktu, pikiran, maupun bentuk dukungan lainnya. Partisipasi pada tahap ini menunjukkan sejauh mana masyarakat ikut berkontribusi dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.



Berdasarkan hasil penelitian di Desa Huntu Barat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa, tim pelaksana kegiatan, pemuda, hingga masyarakat umum ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Kepala Desa dan Sekretaris Desa berperan dalam mengarahkan, mengawasi, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan masyarakat dilibatkan langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui tenaga, gotong royong, bantuan swadaya, serta dukungan terhadap kegiatan pembangunan desa. Masyarakat ikut membantu dalam kegiatan seperti perbaikan saluran air, pembangunan jalan usaha tani, drainase, hingga program pemberdayaan masyarakat seperti bioflok perikanan. Selain itu, budaya gotong royong masih cukup kuat di Desa Huntu Barat, di mana masyarakat saling membantu dalam kegiatan pembangunan tanpa selalu mengharapkan imbalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih didukung oleh rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Safutri Sari (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat, solidaritas sosial, serta dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk gotong royong dan swadaya menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Huntu Barat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif terlibat secara langsung karena keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani maupun peternak. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang hanya memberikan dukungan secara tidak langsung atau sekadar mengetahui adanya kegiatan pembangunan tanpa ikut terlibat dalam pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berbeda-beda pada setiap kegiatan pembangunan desa.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Slamet (1993) dalam Hakim (2017) yang menyatakan bahwa mata pencaharian dan tingkat penghasilan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, pekerjaan masyarakat yang sebagian besar berada di sektor pertanian dan peternakan mempengaruhi waktu luang masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Gunanta Ginting, Aos Kuswandi, dan Ayuning Budiati (2024) yang menunjukkan bahwa salah satu kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa



adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berbenturan dengan aktivitas utama masyarakat sebagai petani.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Huntu Barat dapat dikatakan telah berjalan cukup baik karena masyarakat telah dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan melalui tenaga, gotong royong, dan dukungan swadaya. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya merata karena masih dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, waktu, dan kondisi masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. pemanfaatan hasil

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selainya suatu program, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Selanjutnya, Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil (participation in benefits) dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki dan memanfaatkan manfaat yang dihasilkan dari suatu program pembangunan. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, maka semakin menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Huntu Barat, masyarakat secara umum telah merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Manfaat tersebut terlihat dari penggunaan saluran air untuk mendukung aktivitas pertanian, pemanfaatan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen, serta program bioflok yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kaligus dengan memberikan ruang tambahan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan tidak hanya berhenti pada penyelesaian fisik semata, tetapi telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena sebelumnya melalui proses musyawarah dan pengusulan masyarakat. Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program yang dibangun menjadi faktor penting yang mendorong tingginya tingkat pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat langsung dimanfaatkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, pemanfaatan hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa manfaat yang dirasakan berbeda-beda karena kebutuhan setiap masyarakat tidak sama. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang terlibat sejak tahap awal pembangunan sehingga



pe manfaatan hasil pe mbangunan be lum dilakukan se cara maksimal. Kondisi te rse but me nunjukkan bahwa tingkat ke te rlibatan masyarakat turut me mpe ngaruhi tingkat pe manfaatan hasil pe mbangunan. Te muan ini se jalan de ngan pe ne litian Nurul Hanazah dan Syaprianto yang me nyatakan bahwa manfaat pe mbangunan akan le bih optimal apabila masyarakat me miliki ke te rlibatan dan rasa me miliki te rhadap program yang dilaksanakan.

De ngan de mikian, partisipasi masyarakat dalam pe manfaatan hasil pe mbangunan di De sa Huntu Barat se cara umum te lah be rjalan cukup baik kare na se bagian be sar hasil pe mbangunan te lah dimanfaatkan dan me mbe rikan manfaat nyata bagi masyarakat, te rutama pada se ktor pe rtanian, e konomi, dan fasilitas umum. Akan te tapi, manfaat pe mbangunan te rse but be lum se pe nuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat karena adanya perbedaan kebutuhan, tingkat keterlibatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan desa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang direncanakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pembangunan desa, evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Cohen dan Uphoff (1977) menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian, tanggapan, kritik, maupun masukan terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan yang telah dilakukan. Melalui evaluasi, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Huntu Barat, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan telah dilakukan melalui musyawarah desa dan berbagai forum pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan pendapat, tanggapan, maupun masukan terkait pelaksanaan program pembangunan desa. Selain melalui forum resmi, sebagian masyarakat juga menyampaikan masukan secara langsung kepada aparat desa mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan maupun kebutuhan pembangunan yang masih perlu diperhatikan pada periode berikutnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap hasil pembangunan. Keterbukaan pemerintah desa dalam menerima berbagai masukan dan kritik dari masyarakat menunjukkan bahwa proses evaluasi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan desa.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih cenderung pasif dalam menyampaikan pendapat maupun kritik



terhadap pembangunan desa. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah pembangunan selesai dilaksanakan maka tugas mereka juga telah selesai, sehingga kurang terdorong untuk memberikan masukan atau melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Selain itu, masyarakat yang aktif memberikan evaluasi umumnya merupakan masyarakat yang sering mengikuti kegiatan desa atau terlibat langsung dalam program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suleman dan Maku (2020) serta Ngiu dan Djafar (2022) yang menunjukkan bahwa meskipun forum evaluasi telah tersedia, tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih belum merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Desa Huntu Barat dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan penilaian, masukan, dan tanggapan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan serta adanya keterbukaan pemerintah desa dalam menerima aspirasi masyarakat. Akan tetapi, partisipasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam menyampaikan evaluasi sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan belum merata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Pada aspek pengambilan keputusan, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan menyampaikan usulan, pendapat, dan kebutuhan pembangunan desa. Namun, tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam forum musyawarah masih belum merata karena dipengaruhi oleh kesibukan pekerjaan serta masih adanya masyarakat yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, pada aspek pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan gotong royong, swadaya, dan dukungan terhadap berbagai program pembangunan desa. Hasil pembangunan yang dilaksanakan juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas pertanian, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, kritik, dan masukan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan melalui musyawarah maupun komunikasi langsung dengan pemerintah desa. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat pada ketiga aspek tersebut masih belum sepenuhnya merata karena dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan, tingkat pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi



masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Huntu Barat masih perlu ditingkatkan agar lebih aktif, merata, dan optimal pada setiap tahapan pembangunan desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, S. I. P., Ibrahim, M., Sofyan, B., Sip, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit Qiara Media.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4), 1938–1951.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. (1977). *Rural Development Participation: Concepts And Measures For Project Design, Implementation And Evaluation*. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:152791808>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place In Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Deva, A., Haryanto, A. T., & Suhita, D. (2023). .: Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Sambirejo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. *Solidaritas*, 7(1).
- Dini, A. P., Muhammad, ., & Firdaus, R. (2024). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
- Dwi Indah Yuliani Solihin, Arifin Tahir, Yanti Aneta, & Juriko Abdussamad. (2020). The Complexity Of Realizing Good Governance In Public Services. *International Journal Of Advanced Engineering, Management And Science*, 6(10), 445–450. <https://doi.org/10.22161/ijaems.610.1>
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan / Siti Irene Astuti Dwiningrum. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:180308759>
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh Dan Tantangan. *Neorespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–124. <https://doi.org/10.52423/Neores.V6i1.1084>
- Gitamara, B. A., & Nuraini, A. (2025). “Perkembangan Paradigma Administrasi: Perbandingan Opa, Npm, Dan Nps Dalam Pemerintahan Modern.”
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, G., Roushandy Asri Fardani, Ms., Jumari Ustiawaty, Mp., Evi Fatmi Utami, Ms., Dhika Juliana Sukmana, A., Rahmatul Istiqomah, R., Oleh, D., Pustaka Ilmu Editor, C., & Abadi, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388.
- Lasa, L., & Jcoevang Oeray Sintang Kalimantan Barat, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mahagarmitha, R. R. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kampung Warna-Warni Teluk Seribu Kota Balikpapan. *Arteks: Jurnal Teknik Arsitektur*, 3(1), 47–56.
- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, R. D. (2025). *Paradigma Administrasi Publik Dalam Teori Dan Praktek*.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi Administrasi Publik*. Aura Cv. Anugrah Utama Raharja.



- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). *F. Analisis Data. Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 61.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Pin, P., Afri, M., & Lubis, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. In *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 4).
- Putri, C. E. (2025). Musrenbang Desa Sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatoris: Studi Kasus Di Desa Tamansari. *Journal Publicuho*, 8(3), 1593–1604.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rafinzar, R. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir. [Http://Ejurnal.Stisipolcandradimuka.Ac.Id/Index.Php/Jurnalpublisitas/](http://Ejurnal.Stisipolcandradimuka.Ac.Id/Index.Php/Jurnalpublisitas/)
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Global Eksekutif Teknologi. [Www.Globaleksekutifteknologi.Co.Id](http://www.Globaleksekutifteknologi.Co.Id)
- Safutri Sari, D. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang. 4(2), 4144–4158.
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal Of Constitutional Law*, 1(01), 95–106.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. [Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:201477552](https://api.semanticscholar.org/Corpusid:201477552)
- Sulila, I. (2022). The Effect Of Community Participation And Supervision On The Effectiveness Of Village Fund Policy Implementation In Indonesia. *International Conference On Communication, Policy And Social Science (Inccclusi 2022)*, 372–379.
- Syamsudin, M., Oevank Oeray Nomor, J., & Kota Sintang, B. (2023). *Perencanaan Pembangunan*.
- Tandabioh, K., & Rahmatyah, S. (2021). Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Desa Di Wilayah Kabupaten Konawe (Vol. 8, Number 3).